

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 28
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perekonomian, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III, dan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 18 April 2017
Waktu	: 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara	: Membahas mengenai revolusi parlemen eropa terkait minyak sawit
Ketua Rapat	: Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo
Hadir	: A. 37 Anggota dari 51 Anggota Komisi IV DPR RI B. Hadir Undangan: <ol style="list-style-type: none">1. Ir. Bambang, MM. (Direktur Jenderal Perkebunan);2. Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);3. Dr.Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);4. Wilistra Danny (Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura Kementerian Perekonomian);5. Ridwan Hassan (Staf Ahli Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri);6. Seger Budiarjo (Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT. Perkebunan Nusantara III); dan7. Joko Supriyono (Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perekonomian, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III, dan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia dalam rangka membahas mengenai revolusi parlemen eropa terkait minyak sawit, pada hari Selasa tanggal 18 April 2017, dibuka pukul 14.30 WIB oleh Ketua Rapat Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M,Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah menyesalkan adanya Resolusi Parlemen Eropa terkait produk sawit, ditengah upaya Pemerintah Indonesia yang sedang gencar melakukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% sampai dengan tahun 2030 dari tingkat *business as usual* dengan usaha sendiri dan mencapai 41% apabila mendapat dukungan internasional, diantaranya Pemerintah sudah dan sedang melakukan moratorium pemberian izin usaha baru di kawasan gambut dan hutan primer, serta melakukan penguatan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO).
2. Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah bersepakat bahwa perkebunan kelapa sawit bukan merupakan penyebab utama terjadinya deforestasi karena hanya berkontribusi kurang lebih 2,5% terhadap deforestasi global, sehingga keputusan Parlemen Eropa merupakan keputusan subjektif dan diskriminatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia, apa lagi dikaitkan dengan isu yang tidak mendasar seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan tuduhan memperkerjakan anak-anak.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyiapkan data dan argumen bantahan yang lengkap dan komprehensif terkait dengan tuduhan Parlemen Eropa, sejalan dengan itu Pemerintah harus melakukan promosi dan diplomasi ke berbagai negara pengguna produk kelapa sawit dalam rangka meningkatkan kredibilitas industri kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang kelapa sawit ikut berkomitmen mengurangi laju deforestasi, peduli terhadap konservasi keanekaragaman hayati dan mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai wujud tanggung jawab terhadap upaya pelestarian lingkungan.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang kelapa sawit untuk mencermati perkembangan serta dampak yang timbul akibat Resolusi Parlemen Eropa tentang minyak sawit sehingga tidak menghambat roda ekonomi rakyat dan mengganggu target pertumbuhan ekonomi nasional.
6. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran dari hasil Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dapat digunakan secara optimal untuk pembinaan, penelitian, dan replanting kebun sawit rakyat, serta promosi dalam rangka meningkatkan kredibilitas produk kelapa sawit di dunia internasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

KOMISI IV DPR RI
KETUA RAPAT,

Ttd.

DR. IR. HERMAN KHAERON, M.Si.
A-419

DIREKTUR JENDERAL
PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN,

Ttd.

IR. BAMBANG, MM.

ASISTEN DEPUTI PERKEBUNAN
DAN HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PEREKONOMIAN,

Ttd.

WILISTRA DANNY

DIREKTUR SDM DAN UMUM
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III

Ttd.

SEGER BUDIARJO

DIREKTUR JENDERAL
PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,

Ttd.

PROF. DR. IR. SAN AFRI AWANG, M.SC.

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM, KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Ttd.

DR.IR. NUR MASRIPATIN, M.FOR.SC.

STAF AHLI DIPLOMASI EKONOMI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI,

Ttd.

RIDWAN HASSAN

KETUA GABUNGAN PENGUSAHA
KELAPA SAWIT INDONESIA,

Ttd.

JOKO SUPRIYONO

